

**PERANAN DINAS PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN
KOTA MEDAN DALAM MENERAPKAN
KEBIJAKSANAAN PENGADAAN RUMAH
SEDERHANA DI KECAMATAN
MEDAN LABUHAN**

S K R I P S I

OLEH

ELLY NADRA

NPM : 00 850 0038

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MEDAN AREA
M E D A N
2 0 0 4**

LEMBARAN PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : **PERANAN DINAS PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN KOTA MEDAN DALAM MENERAPKAN KEBIJAKSANAAN PENGADAAN RUMAH SEDERHANA DI KECAMATAN MEDAN LABUHAN**

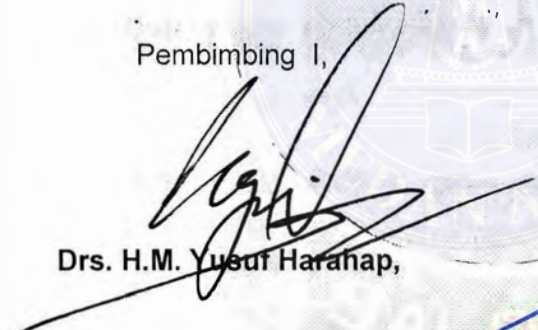
Nama Mahasiswa : ELLY NADRA
No. Stambuk : 00 850 0038
Program Studi : Ilmu Pemerintahan

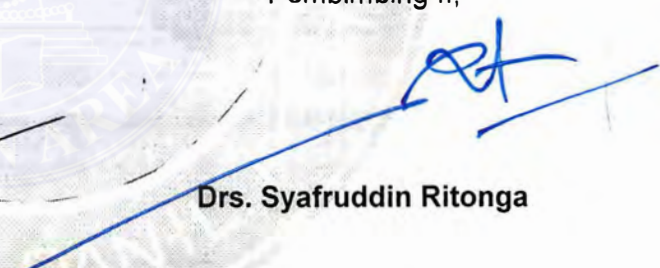


Menyetujui :
Komisi Pembimbing

Pembimbing I,

Pembimbing II,

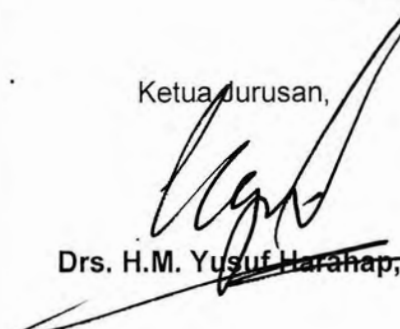

Drs. H.M. Yusuf Harahap,



Drs. Syafruddin Ritonga

Ketua Jurusan,

Mengetahui :

Dekan,


Drs. H.M. Yusuf Harahap,


Drs. Usman Tarigan, MA,



Tanggal lulus : Rabu, 14 April 2004

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim,

Pada kesempatan yang pertama ini penulis mengucapkan Puji Syukur kepada Allah SWT, karena atas berkah dan rahmad-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini guna melengkapi tugas-tugas yang diwajibkan kepada Mahasiswa Universitas Medan Area pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jurusan Ilmu Pemerintahan untuk memperoleh gelar kesarjanaan.

Dalam penulisan skripsi ini penulis mengalami banyak kesulitan seperti keterbatasan waktu, kurangnya literatur yang diperlukan, keterbatasan kemampuan menulis sendiri dan sebagainya, namun demikian dengan kemauan keras yang didorong oleh rasa tanggung-jawab dan dilandasi itikad baik, akhirnya kesulitan tersebut dapat diatasi.

Adapun judul yang diajukan sehubungan dengan penyusunan skripsi ini adalah “ PERANAN PEMERINTAH KOTA DALAM MENGADAKAN KEBIJAKSANAAN PENGADAAN RUMAH MURAH DI KOTA MEDAN“.

Dalam penulisan skripsi ini banyak pihak telah penulis buat sibuk maka pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima-kasih kepada pihak-pihak tersebut, terutama kepada :

- Bapak Drs Usman Tarigan, MS, selaku Dekan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area .

DAFTAR ISI

	halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR GAMBAR	v
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	4
C. Pembatasan Masalah	5
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
E. Kerangka Pemikiran	7
F. Hipotesis	8
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	9
A. Pengertian Pemerintah dan Pemerintahan	9
B. Peranan Pemerintah	12
C. Pengadaan Rumah Murah	16
D. Pengertian Tentang Kebijakan	17
E. Aspek-Aspek Kebijakan	19
BAB III. METODOLOGI PENELITIAN	23
A. Populasi dan Sampel	23
B. Metode Pengumpulan Data	24
C. Variabel Penelitian	24

D. Metode Analisis Data	26
BAB IV. DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN	27
A. Tugas dan Fungsi Dinas Perumahan dan Pemukiman Kota Medan	27
B. Struktur Organisasi	29
BAB V. ANALISIS DAN EVALUASI.....	45
A. Letak Lokasi Pengadaan Rumah Sangat Sederhana	45
B. Pola Penanganan Kebijakan Penyediaan Rumah Sangat Sederhana	46
C. Konsep Dasar Penyediaan Rumah Sangat Sederhana	50
D. Kebijakan Pembinaan Masyarakat Dalam Pengadaan Rumah Sangat Sederhana	54
BAB VI. KESIMPULAN DAN SARAN	59
A. Kesimpulan	59
B. Saran	60

DAFTAR KEPUSTAKAAN

LAMPIRAN

DAFTAR GAMBAR

	halaman
1. Struktur Organisasi Dinas Perumahan Dan Pemukiman Kota Medan ..	43



BAB I

P E N D A H U L U A N

A. Latar Belakang Masalah

Proses pembangunan pemekaran kota ke arah perluasan areal aktivitas sosial dan ekonomi yang melintas wilayah pedesaan, yang dimotori oleh pengadaan aktivitas-aktivitas ekonomi baru, merupakan salah satu ciri berkembangnya nilai-nilai modernitas di suatu masyarakat. Proses pembangunan ekonomi versi ini dapat memberikan stimulus warga masyarakat pedesaan untuk mengadopsinya. Hal ini disebabkan, oleh karena mereka mulai memproyeksikan dirinya sendiri dengan menempatkan peranan orang lain yang dianggap lebih baik daripada mereka. Proses selanjutnya mereka mulai membandingkan pola-pola yang selama ini dialami dengan pola-pola baru yang datang dari luar, yang keberadaannya dianggap dapat mendukung dinamika kemajuan dirinya, khususnya dalam tuntunan kebutuhan ekonomi.

Pembangunan pemekaran kota tersebut berakibat pada ketimpangan di dalam pemilikan lahan yang pada akhirnya terjadi ketimpangan distribusi pendapatan masyarakat pedesaan. Dalam hal ini mengindikasikan ketidakmerataan status sosial ekonominya. Berkaitan dengan itu, dinamika sektor pertanian mengalami penurunan dan peluang ekonomi yang ada mengalami penyempitan, sehingga orang-orang yang berkecimpung dalam sektor tersebut mengalami

penurunan penghasilan. Terjadinya penyempitan skala usaha pertanian yang dalam hal ini dapat di pandang sebagai akibat dari penyempitan secara relatif lahan pertanian, berakibat pula pada penurunan pendapatan dan sekaligus kesejahteraan petani. Dengan demikian, bekerjanya nilai-nilai modernisasi di masyarakat pedesaan tersebut berakibat menyempitnya lahan-lahan pertanian di pedesaan.

Pada dasarnya pembangunan wilayah yang lazim disebut sebagai pembangunan regional merupakan pembangunan yang bersifat integral. Artinya, pembangunan tersebut adalah perpaduan pengembangan pedesaan dan pembinaan perkotaan yang mencakup berbagai aspek kehidupan masyarakat yang secara operasional didasarkan pada sektor-sektor yang ada didalamnya.

Pembangunan wilayah pemukiman yang menuju ke arah pembangunan perumahan ini telah memberikan isyarat bahwa semakin mendekatkan proses interaksi antara desa dan kota. Dalam hal ini B.N Marbun menegaskan bahwa pembangunan perumahan yang berkembang keluar atau ke pinggir kota telah tersebar ke luar wilayah kota sampai pada daerah pedesaan. Konsekuensi dari perkembangan tersebut diprediksikan mengakibatkan pertumbuhan pendapatan nasional yang maksimal, dan stabilitas kesempatan kerja.¹

Dengan perkembangan areal pemukiman perkotaan yang melintas daerah pedesaan sebagai suatu indikasi semakin menyempinya lahan di daerah perkotaan

¹ B.N, Marbun, *Kota Indonesia Masa Depan, Masalah dan Proyek*, Jakarta, Erlangga, 1992, hal. 21.



DAFTAR PUSTAKA

- B. Sammis White, *Sektor Perumahan dalam Perencanaan Kota*, Jakarta, Erlangga, 1992.
- B.H, Ercison dan T. Nomsamchue, *Memahami Statistik Untuk Ilmu Sosial*, P3ES, Jakarta, 1998.
- B.N, Marbun, *Kota Indonesia Masa Depan, Masalah dan Proyek*, Jakarta, Erlangga, 1992.
- Bayu Suryaningrat, *Mengenal Ilmu Pemerintahan*, Aksara Baru, Jakarta, 1990.
- Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 1995.
- Kartini Kartono, *Pemimpin dan Kepemimpinan*, Rajawali, Jakarta, 1992.
- M. Solly Lubis, *Azas-Azas Hukum Tata Negara*, Alumni Bandung, 1992.
- Prajudi Atmosudiro, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1991.
- Riant Nugroho, *Kebijaksanaan Publik, Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*, PT.Elex Media Komputindo, Jakarta, 2003.
- Taliziduhu Ndraha, *Metodologi Pemerintahan Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta, 1993.
- William N. Dunn, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2000.
- Winarno Surachmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah (Dasar Metode dan Teknik)*, Tarsito, Bandung, 1990.
- WJS, Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1996.